IDN/ANTARA

KASAD TERIMA GELAR KEHORMATAN PASUNDAN

Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) Jendral TNI Dudung Abdurachman (kanan) menerima gelar kehormatan dari Ketua Paguyuban Pasundan Didi Turmudzi (kiri) di Gedung PB Paguyuban Pasundan, Bandung, Jawa Barat, Senin (29/8). Paguyuban Pasundan memberikan penghormatan dengan gelar kehormatan Wastu Jana Parakrama atau Pinisepuh Pasundan atas pencapaian pribadi Jendral TNI Dudung Abdurachman sebagai putra Jawa Barat dalam menjaga kebangsaan NKRI.

Polisi Tetapkan 12 Tersangka Pengeroyokan Santri di Tangerang

Dari belasan orang tersangka tersebut, hanya sebagian yang telah dilakukan penahanan. Sementara sebagian lainnya tidak dilakukan karena usianya di bawah 14 tahun.

TANGERANG (IM)- Polres Metro Tangerang Kota menetapkan belasan orang santri sebagai tersangka dalam kasus pengeroyokan terhadap seorang santri di Pondok Pesantren Darul Quran Lantaburo di Kelurahan Ketapang, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Banten. Belasan orang tersebut dinilai terbukti melakukan aksi pengeroyokan yang menyebabkan korban berinisial RAP (13 tahun) meninggal dunia.

"Dari beberapa saksi dan orang yang kita amankan, ada 12 anak (santri) yang kita tetapkan sebagai tersangka karena diduga telah melakukan tindakan kekerasan terhadap anak," kata Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Pol Zain Dwi Nugroho kepada wartawan, Senin (29/8).

Dari belasan orang tersangka tersebut, Zain menyebut hanya sebagian yang telah dilakukan penahanan. Sementara sebagian lainnya tidak dilakukan karena usianya di bawah 14 tahun.

"Dari pelaku tersebut, lima orang kita tahan, sedangkan tujuh anak kita titipkan ke orang tuanya karena itu sesuai dengan ketentuannya, karena anak di bawah usia 14 tahun itu tidak bisa dilakukan penahanan," tuturnya.

Kelima orang tersangka tersebut saat ini telah ditahan di Mapolres Metro Tangerang Kota. Mereka diketahui merupakan pelajar kelas IX SMP. Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan, polisi mengamankan sejumlah barang bukti dalam pengungkapan kasus tersebut.

"Dari hasil autopsi itu bahwa terjadi kekerasan benda tumpul dan itu di (mengenai) bagian kepala, wajah, dada, dan beberapa di bahu. Kemudian juga keterangan anak-anak itu, mereka juga melakukan pemukulan dengan tangan dan kaki dan membenturkan kepalanya ke tembok," jelasnya.

Sementara itu, terkait pemeriksaan terhadap pihak pondok pesantren, Zain menyebut pihaknya akan segera melakukan pendalaman. Pihaknya juga akan melakukan pemanggilan terhadap pimpinan ponpes.

"Sementara ini kita masih sebagai saksi ya (pihak ponpes), kita fokus untuk tindakan kekerasan terhadap anak ini. Kita baru memeriksa beberapa, anak teman korban, termasuk pengasuh, kita juga akan panggil ketua ponpesnya," terangnya.

Diketahui, Polres Metro Tangerang Kota menginformasikan adanya insiden pengeroyokan yang terjadi di Pondok Pesantren Darul Quran Lantaburo di Kelurahan Ketapang, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang. Insiden pengeroyokan terjadi pada Sabtu (27/8) sekira pukul 08.30 WIB.

Korban RAP (13) diduga dikeroyok oleh sebanyak 12 orang santri. Yakni berinisial AI (15), BA (13), FA (15), DFA (15), TS (14), S (13), RE (14), DAP (13), MSB (14), BHF (14), MAJ (13) dan RA (13). Berdasarkan informasi yang diperoleh, peristiwa tersebut terjadi disinyalir adanya unsur provokasi dari salah satu pelaku diduga karena ketersinggungan.

"Korban dianiaya oleh para pelaku karena diprovokasi oleh pelaku yang berinisial AI (15) yang menganggap korban sering berbuat tidak sopan yaitu membangunkan seniornya menggunakan kaki," kata Zain.

Insiden itu terjadi usai korban melakukan pengajian di lantai bawah, lalu ia bersama teman lainnya naik ke lantai empat untuk mandi. Namun tiba-tiba korban ditarik ke kamar dan langsung dikeroyok, dipukul, ditendang, dan diinjak-injak oleh para pelaku sehingga mengakibatkan korban jatuh pingsan di tempat kejadian perkara (TKP).

Zain menjelaskan, usai insiden pengeroyokan itu, korban sempat dilarikan ke Rumah Sakit Sari Asih Cipondoh, Kota Tangerang untuk mendapatkan perawatan medis. Namun nahas, korban dinyatakan meninggal dunia di rumah sakit.

"Korban pada saat di Rumah Sakit Sari Asih Cipondoh terlihat tanda lebam di muka, kepala dan dada serta keluar darah di hidung dan buih di mulut korban, untuk memastikan penyebab kematian, saat ini sedang dilakukan autopsi terhadap korban," terangnya.

Kasus pengeroyokan santri yang menyebabkan nyawa melayang tersebut saat ini tengah ditangani oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Sat Reskrim Polres Metro Tangerang Kota. Para pelaku serta sejumlah saksi dibawa ke Mapolres Metro Tangerang Kota untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. ● **pp**

Status Gunung Anak Krakatau Masih Siaga Level III

SERANG (IM)-Status Gunung Anak Krakatau (GAK) di Perairan Selat Sunda antara Provinsi Banten dan Lampung masih Siaga Level III dan direkomendasikan radius lima kilometer dari kawah gunung. "Masyarakat, wisatawan, pendaki, dan nelayan tidak boleh mendekati kawah aktif gunung," kata Deni Mardiono dalam laman KESDM Badan Geologi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Pos Pengamatan Pasauran Gunung Anak Krakatau, pada Senin (29/8).

Saat ini, kawasan Gunung Anak Krakatau di Perairan Selat Sunda itu dengan cuaca berawan hingga 25.7-26 derajat Celcius, 50-72 persen dan angin bertiup lemah ke arah barat daya. Saat ini, ketinggian Gunung Anak Krakatau 157 meter DPL (di atas permukaan laut) dari permukaan laut.

Secara visual, kawasan Gunung Anak Krakatau tertutup 0-III dan kawasan kawah tidak teramati. Kegempaan microtremor/tremor menerus dengan amplituda 0,3 - 5 mm dan amp dominan 1 mm.

Dengan demikian, kini status Anak Krakatau Siaga Level III sehingga nelayan, wisatawan, masyarakat, pendaki gunung, dan pelaku pelayaran tidak boleh mendekati kawah gunung tersebut. PVMBG hanya merekomendasikan daerah aman di radius lima kilometer dari kawah Gunung Anak Krakatau.

Pelarangan itu, karena cukup berbahaya jika mendekati kawasan kawah Anak Krakatau yang masih aktif itu dan bisa menimbulkan kecelakaan. Sementara itu, kegiatan masyarakat pesisir pantai barat Provinsi Banten mulai kawasan Anyer - Carita dan Labuan, Pandeglang relatif normal seperti biasanya. Masyarakat pesisir pantai itu tidak berdampak terhadap aktivitas Gunung Anak Krakatau berstatus Siaga Level III. "Kami tetap melaut untuk mencari nafkah," kata Abu (45) seorang nelayan TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Teluk Labuan. ● **pra**

Buntut Pidato 'Amplop Kiai', Ratusan Santri Geruduk Kantor PPP Banten

SERANG (IM)- Ratusan santri dan ulama menggeruduk Kantor DPW PPP buntut ucapan Suharso Monoarfa terkait 'amplop kiai' pada acara Pembekalan Antikorupsi Politik Cerdas Berintegritas yang diselenggarakan KPK pada 15 Agustus 2022 lalu.

"Kami menuntut Pak Suharso sebagai Ketua Umum PPP untuk segera diproses, diadili, karena telah mendistorsi muruah pesantren dan kiai," kata koordinator aksi Aliansi Forum Santri Banten, Haris Munandar, di lokasi, Senin (29/8).

Mereka juga berencana melaporkan Suharso Monoarfa ke Polda Banten atas dugaan pelanggaran Undang-undang (UU) ITE karena dianggap telah melukai harkat dan martabat para kiai.

Tak hanya itu, massa rencananya akan mendatangi Kantor DPP PPP di Jakarta. Rencana tersebut tercetus setelah berkomunikasi dengan para ulama dan kiai di Pulau Jawa.

"Kita juga mengimbau Presiden untuk mempertimbangkan posisi Suharso di kabinet," terangnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua DPW PPP Banten, Subadri Ushuludin yang menemui pedemo memastikan aspirasi para ulama dan kiai dalam aksi tersebut akan disampaikan ke DPP PPP di Jakarta.

Namun Subadri meminta para ulama dan kiai untuk melihat video pidato Suharso Monoarfa secara utuh, sehingga mengetahui maksud dan tujuan dari Ketua Umum PPP berbicara seperti itu.

"Saya sendiri belum melihat video utuh, Ketua Umum di (acara) Tindak Pidana Pencegahan Korupsi bersama KPK. Ketua Umum juga menyampaikan internal untuk pencegahan korupsi," kata Ketua DPW PPP Banten, Subadri Ushuludin.

Subadri yang juga menjabat Wakil Wali Kota Serang itu meminta ulama dan kiai tidak mudah terprovokasi dengan isu yang beredar luas. Terlebih, PPP dianggapnya tidak bisa lepas dari kiai, ulama dan santri.

"Tabayun di era digital ini kan, kita sesungguhnya belum tahu gimana. Namanya politik itu kan A jadi Z, Z jadi A. (Kiai dan ulama) Itu sebenarnya leluhur PPP juga," ujarnya. ● **pra**

Jalan Lingkungan Diperbaiki, Warga Solear Tangerang Sampaikan Apresiasi

TANGERANG (IM)- Warga Perumahan Guru PKGC, tepatnya di RT 3/1 Desa Pesanggrahan, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang, mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten, karena sudah memperbaiki sejumlah ruas jalan lingkungan.

Ketua RW1 Desa Pesanggrahan, Mohamad mengatakan, perhatian Pemprov Banten sangat dirasakan warga. Sebab, jalan rusak di wilayah tersebut sudah lama dikeluhkan serta mengganggu aktivitas keseharian warga.

"Melalui Pak Asda, kami sampaikan hatur nuhun atas kepedulian pemerintah provinsi. Alhamdulillah sekarang jalan jadi mulus, warga bisa aktivitas lancar," ujarnya, Senin (29/8).

Dia menjelaskan, selama ini jalan lingkungan di Perum Guru PKGC memang belum tersentuh pembangunan. Salah satu sebabnya, fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos fasum) perumahan lama itu belum diserahkan pengembang ke pemerintah daerah.

Pihaknya juga mengaku tidak bisa berbuat banyak, kecuali hanya sebatas melakukan survei, pendataan, kontrol, dan mengusulkan perbaikan kepada pihak-pihak terkait. "Tapi dengan kehadiran pemerintah provinsi, masalah lama ini terpecahkan," tegasnya.

Tokoh masyarakat RT3/1 Desa Pesanggrahan, Soleh menyampaikan, bahwa memang banyak masalah terkait dengan sarana, prasarana, dan utilitas umum sejak perumahan itu dibangun tahun 1997 silam.

Terlebih, pengelola perumahan adalah koperasi yang belum memiliki kemampuan terutama dari segi pendanaan. Di samping itu, jika mengandalkan swadaya dengan membebankan semua biaya perbaikan pada warga, jelas sangat memberatkan.

"Kita warga menengah ke bawah. Hanya separuh saja yang punya pegangan penghasilan. Banyak yang sudah umur, enggak punya kerjaan," ungkapnya.

Karena itu, dia bersyukur atas inisiatif yang dilakukan Pemprov Banten. "Jadi, kami langsung merasakan dampaknya," ucap Soleh.

Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah (Asda I) Provinsi Banten, Komarudin menyampaikan, perbaikan jalan di RT 3 desa tersebut merupakan bagian dari inisiatif kebijakan yang dilakukan Pemprov Banten di daerah kabupaten atau kota.

Selain sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab, langkah itu juga bagian dari pelaksanaan prinsip sinergitas dan kolaborasi antar pemprov dengan warga, juga dengan semua pihak terkait.

"Dengan cara itu akan terjadi akselerasi pembangunan, sehingga dampak pembangunan bisa langsung dirasakan warga," tuturnya.

Komarudin pun berpesan agar jalan yang sudah diperbaiki dirawat dengan baik serta digunakan untuk kepentingan bersama.

"Semoga jalan ini bisa bermanfaat, dirawat sebaik-baiknya, sehingga masa pakainya lebih lama," pungkasnya. ● **pra**

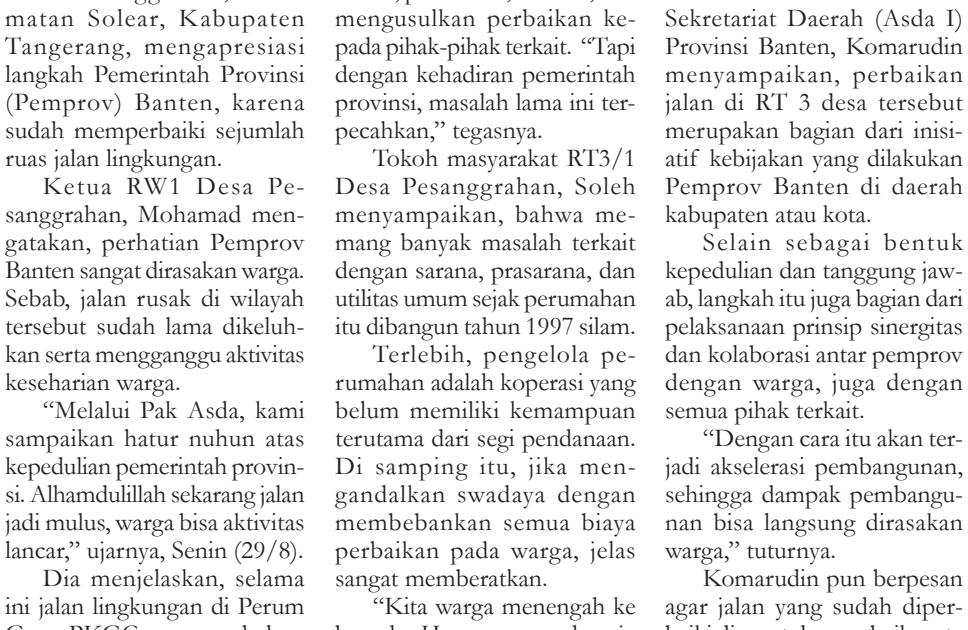

IDN/ANTARA

WISATA EDUKASI TENUN BADUY

Wanita Suku Baduy membimbing siswa menenun kain di Rangkasbitung, Lebak, Banten, Senin (29/8). Wisata edukasi dengan belajar memproduksi kain tenun Baduy tersebut bertujuan untuk mengenalkan budaya lokal kas Baduy.

PEMBUANGAN SAMPAH KE TPA CILOWONG DISOAL

DLH Tangsel: Dalam Aturan Tidak Ada Izin

TANGSEL (IM)- Pemerintah Kota Tangerang Selatan melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangsel angkat bicara terkait dipermasalahkannya izin membuang sampah ke TPA Cilowong, Kota Serang. Menurut Kepala DLH Kota Tangsel, Wahyunoto Lukman, di dalam aturan tidak ada izin yang harus diajukan Pemkot Tangsel ke Pemprov Banten membuang sampah ke TPA Cilowong.

Terlebih membuang sampah ke TPA Cilowong tidak gratis. Pemkot Tangsel memberi bantuan keuangan Rp 21 miliar ke Pemkot Serang melalui kerjasama penanganan sampah selama 3 tahun ke depan. "Tidak ada (aturan terkait-red) izin. Justru di dalam UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pemprov Banten seharusnya memfasilitasi kerjasama penanganan sampah antar Pemerintah Kota dan Kabupaten. Bahkan mengadakan mediasi sengketa dalam penanganan sampah," ujarnya, Senin (29/8).

Pemprov Banten, kata Wahyu, seharusnya mengetahui sampah di Kota Tangsel dan Kota Serang, adalah sampah di wilayah Provinsi Banten juga. Sehingga penanganan sampah harusnya dilakukan juga oleh Pemprov Banten dan bukannya mempersoalkan penanganan sampah yang dilakukan Pemkot Tangsel dan Pemkot Serang. Wahyu menambahkan, dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa penanganan sampah oleh Pemerintah Kabupaten Kota dan Pemprov sudah mendapat porsinya masing-masing.

Pemprov Banten sendiri diamanahkan untuk membuat TPA regional. Namun, sampai saat ini pembangunan TPA regional belum dilakukan Pemprov Banten. "Kalau belum bisa membangun TPA regional, harusnya lebih peka terhadap persoalan sampah di Kabupaten dan Kota. Bukannya malah memperkeruh berbicara izin yang dalam ketentuan tidak ada," tegasnya. ● **pra**

Pemkab Lebak Siapkan 125 Ton Beras untuk Kendalikan Inflasi

LEBAK (IM)- Pemerintah Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, menyiapkan sebanyak 125 ton beras untuk kepentingan operasi pasar dalam upaya mengendalikan inflasi di wilayah tersebut. "Kami sediakan beras guna menstabilkan harga di pasaran jika terjadi kenaikan inflasi," kata Wakil Bupati Lebak, Ade Sumardi di Lebak, kemarin.

Pemerintah Kabupaten Lebak selain memiliki cadangan beras pemerintah daerah sebanyak 125 ton juga menyiapkan anggaran dari APBD tahun 2022. Pengalokasian anggaran itu nantinya untuk menstabilkan harga kebutuhan bahan pokok.

Saat ini, cadangan beras pemerintah daerah sebanyak 125 ton kini disimpan di Perum Bulog Lebak, Pandeglang. Ia mengatakan, jika terjadi kenaikan maka dilakukan operasi pasar guna mengendalikan inflasi. Selain itu juga pemerintah daerah terus menggenjot kinerja sektor pertanian untuk memastikan ketersediaan bahan pangan.

Berdasarkan laporan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lebak pasokan bahan pokok di sejumlah pasar tradisional melimpah. Selain itu juga harga di pasaran masih relatif stabil dan daya beli masyarakat juga cenderung meningkat. "Kami menjamin pasokan bahan pokok dipastikan aman dan terpenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat," katanya menjelaskan.

Menurut dia, Kabupaten Lebak sempat mengalami kenaikan inflasi akibat komoditas kebutuhan pangan melonjak, seperti harga cabai, bawang merah mencapai Rp100 ribu/kilogram dan minyak goreng Rp22 ribu/liter.

Komoditas pangan yang memicu inflasi itu, karena pasokan dari luar daerah diterjang hama akibat curah hujan tinggi. Karena itu, pemerintah daerah mengajak masyarakat untuk melakukan gerakan tanam cabai dan bawang merah. Gerakan tanam itu agar memenuhi kebutuhan konsumsi pangan masyarakat, sehingga mampu menstabilkan harga di pasaran.

"Dengan gerakan tanam itu bisa memenuhi konsumsi pangan masyarakat sehingga harga kebutuhan bahan pokok stabil," katanya menjelaskan.

Kepala Disperindag Kabupaten Lebak, Orok Sukmana mengatakan pemerintah daerah menjamin ketersediaan bahan pokok, bahkan sejak satu bulan terakhir harga cabai kembali stabil dengan harga Rp40 ribu/kg, minyak goreng curah Rp12 ribu/liter, telur Rp28 ribu/kg, gula pasir Rp12 ribu/ kilogram, dan daging ayam Rp32 ribu/kg. Sedangkan, komoditas beras hingga kini tetap stabil dengan jenis Kualitas I dijual Rp9000/kg, beras Kualitas II Rp8. 500/kg, dan beras Kualitas III Rp8.000/kg. "Kami akan melakukan OP jika terjadi kenaikan di atas 10 persen untuk kembali mengendalikan harga stabil," katanya. ● **pra**

IDN/ANTARA

APRESIASI BAGI ATLET ASEAN PARAGAMES

Atlet NPCI Kota Bandung menunjukkan medali emas Asean Paragames di Balai Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (29/8). Pemerintah Kota Bandung memberikan apresiasi kepada atlet peraih Asean Paragames yang berasal dari NPCI Kota Bandung yang telah meraih prestasi 15 medali emas, 9 medali perak, dan 9 medali perunggu.

Demo ke DPRD, Mahasiswa Tolak Kenaikan Harga BBM

LEBAK (IM)- Sejumlah mahasiswa di Kabupaten Lebak, Banten melakukan aksi penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Mereka menyuarakan aspirasinya di depan gedung DPRD Lebak. Aksi dimulai pukul 11.50 WIB dan masih berlangsung hingga saat ini. Ketua HMI Cabang Lebak Mulyana mengatakan aksi kali ini membawa tiga tuntutan, pertama soal penolakan kenaikan harga BBM.

"Pemerintah hari ini dalam mengeluarkan kebijakan hanya mementingkan golongan tertentu saja. Terkait rencana kenaikan harga BBM tentu kami sangat menolak," kata Mulyana kepada awak media di lokasi, Senin (29/8).

Menurutnya, kebijakan pemerintah hari ini sangat merugikan masyarakat. Jika rencana ini tidak ditolak, kata Mulyana, masyarakat akan dipaksa mengeluarkan biaya lebih untuk membeli BBM. Sementara kondisi ekonomi masyarakat Indonesia baru bangkit pascapandemi Covid-19. "Jelas (merugikan masyarakat). Kondisi hari ini belum sepenuhnya dikatakan pulih. Dengan rencana kenaikan harga BBM maka akan membuat keresahan baru dan menghambat proses pulih pascapandemi ini," tegasnya.

Selain menolak harga BBM, mereka juga menolak tarif listrik yang sudah naik dan permasalahan agraria yang masih terjadi di Indonesia. Lebih lanjut, dia berharap agar aspirasi mahasiswa hari ini bisa disampaikan DPRD Lebak ke pusat. "Dengan isu bersama yang disampaikan di seluruh daerah, kita ikhtiar sampaikan ke DPRD untuk mengawal. Semoga menjadi mempertimbangkan ketika dibawa ke pusat nanti," pungkasnya.

Sebanyak 11 orang pelajar bolos sekolah untuk ikut demo menolak kenaikan harga BBM di depan gedung DPRD Lebak ini. Mereka diamankan petugas saat berkumpul di sekitar lokasi demo. Salah satu pelajar bernama Muhammad Najri membenarkan dirinya bolos sekolah. Tapi dia tidak tahu akan diajak berdemo oleh temannya. "Lagi nongkrong, santai-santai di Balong terus diajak," kata Najri di lokasi.

Najri mengaku, sebelum diajak berdemo, dia sudah ingin pulang ke rumah. Tapi, teman dari sekolah lain mengajaknya ikut demo. "Sebelum pulang diajak, 'ayo mau ikut demo nggak?' 'ayo-ayo, anak lain (sekolah lain) pada rame'," ujarnya menirukan ajakan temannya.

Dia pun mengikuti teman-temannya dari Balong menuju lokasi demo di depan gedung DPRD Lebak. Sebelum mereka masuk barisan, ke-11 pelajar itu langsung diamankan petugas. Petugas menanyai mereka satu-satu dan langsung memanggil pihak sekolah. Diketahui 11 pelajar itu berasal dari tiga sekolah. Semua merupakan siswa kelas 10 atau 11 sekolah menengah atas dan kejuruan.

Dikonfirmasi, Ketua HMI Cabang Lebak Mulyana mengaku tidak secara langsung mengajak pelajar untuk bolos dan berdemo. Mulyana berargumen bahwa para pelajar ikut demo dari seruan aksi yang disebar. "Seruan aksi itu kan untuk mengajak. Kami rasa pelajar sah-sah saja turun (demo) tapi ya itu tadi waktunya tidak pas, bolos ya itu jadi salah," ujar Mulyana. ● **pra**